

Myra Diarsi:

“Kerelawanan harus lebih sensitif gender dan tidak konservatif!”

Sumber:

Judul buku : Bencana Dan Kerelawanan Perempuan Diffabel

Ditulis ulang dari : Jurnal Galang, Vol.3 No.1 Pebruari 2008, PIRAC, 2008, Opini, Hal 71 – 79

Kerja sosial atau kerelawanan, serta merta identik dan ditujukan kepada perempuan. Tidak jarang kata tersebut dimaknai berbeda oleh sebagian orang karena perbedaan perspektif yang lebih banyak dipengaruhi oleh sistem dan kultur yang sangat kuat di Indonesia. Sehingga tanpa disadari, kebijakan yang diciptakan pun berimbas tidak proporsional terhadap perempuan. Guna memahami lebih dalam bagaimana gambaran kerelawanan (kerja sosial) dan perempuan di Indonesia serta berbagai hal yang melingkupinya. Kami mewawancarai Myra Diarsi, seorang ekspertis gender yang selain pendidik juga aktif di beberapa lembaga swadaya masyarakat.

Menurut Mbak Myra, bagaimana memaknai kerja sosial atau kerelawanan perempuan?

Menurut saya, kita perlu mengupas dan menggali lebih banyak lagi pemaknaan *the soul of sosial work*. Kerja sosial sampai sekarang masih sering diplesetkan menjadi kerja-kerja yang karitatif. Menurut saya, hal semacam ini yang harus ditinjau ulang. Karena kerja sosial adalah kerja-kerja yang didasarkan pada persoalan sosial tertentu dengan kajian atau analisis sosial. Jadi kerja sosial itu seharusnya kontekstual. Kontekstual dalam arti harus selalu melihat kepada persoalan sosial apa harus selalu melihat kepada persoalan sosial apa yang muncul. Jika kita masih melihat pekerjaan sosial itu hanya sebagaimana pengertian umum selama ini, yang tidak ada teori pakemnya dengan tinggal dipraktikkan atau diaplikasikan di beberapa tempat. Hal itu bisa disebut sebagai pekerjaan sosial yang konvensional; sudah usang atau kuno.

Sebetulnya, pekerjaan sosial seharusnya tidak bergender. Pekerjaan sosial adalah kewajiban, tanggung jawab, yang bisa dilakukan dan diperankan dengan baik, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Tapi ada konotasinya, pekerjaan sosial dari pemahaman konservatif itu tadi ada konsekuensi logisnya. Ketika pekerjaan konservatif wilayah sosial diberikan, kemudian dianggap sebagai pekerjaan yang tidak menarik imbalan profesional sebagaimana pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih bernilai ekonomis. Maka kemudian diserahkan, disorongkan, ditumpahkan ke wilayah gender yang namanya perempuan. Ini teori selain pengaruh budaya dan politik. Misalnya, Menteri Sosial hanya mengurus hal-hal karitatif, hanya mengurus bencana. Sebetulnya kesosialan tidak hanya terletak di situ. Ada informalisasi dari kerja sosial hanya karena dianggap secara umum nilai materinya kerjanya seharusnya lebih ringan dari yang lain atau diletakkan sebagai yang lebih murah dari yang lain karena itu harus disertai dengan aspek karitatifnya. Itu yang agak rumit dalam persoalan perspektif gender sehingga orang langsung mengaitkan kerja sosial dengan perempuan.

Saya mau mengatakan secara serius, bahwa kerja sosial pun perlu dilandaskan kepada kajian dan pemahaman yang cukup memadai tentang situasi sosial yang hendak dibidik. Artinya situasi sosial sekarang ini dalam perkembangan dunia adalah situasi sosial dan masalah sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Misalnya perubahan kebijakan pemakaian minyak tanah menjadi gas. Persoalan yang lebih khusus misalnya adalah kekerasan. Kekerasan jelas-jelas merupakan pelanggaran HAM. Selama ini, energi satu kelompok masyarakat yang merespon persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat tersedot untuk memikirkan agar masa depan para korban kekerasan tidak terputus, terhalang, dan atau ternodai hanya karena dia mengalami suatu perilaku pelanggaran HAM. Artinya, dengan berbicara demikian saya mau menggarisbawahi apa yang dipikirkan pekerja sosial bahwa apa yang telah mereka lakukan bukanlah memberikan kerelawanan sesaat. Perspektif ke depannya harus diperjelas, begitu juga hasil kajiannya. Itu adalah persoalan yang masih merupakan tanda tanya dan harus dikaji lebih dari sekedar merumpunkan pekerjaan sosial atau kerelawanan dengan perempuan, itu satu.

Kedua, pertanyaan besarnya adalah mengapa harus dikaitkan dengan perempuan? Saya kira telah terjadi penilaian yang kurang dari sisi materi / ekonomi dan biasanya penilaian-penilaian yang kurang dari sisi ekonomi, nilai-nilai ekonomisnya itu gampang saja oleh masyarakat kita, oleh agama, oleh kultur, oleh macam-macam itu ditumpukan pada perempuan. Misalnya pekerjaan rumah tangga mulai dari mencuci, menyetrika, memasak, mengasuh anak. Padahal ini pekerjaan yang sangat ekonomis. Buktinya sekarang dengan perkembangan kapitalisme, misalnya, yang namanya *laundry, catering*, atau apapun detail-detail pekerjaan rumah tangga, untuk keperluan rumah tangga unit per unit, diserahkan kepada ahlinya. Kita membayar kepada mereka. Tetapi jika yang melakukan perempuan (ibu rumah tangga), hal itu seperti sesuatu yang sudah melekat pada hierarkinya, sukarela; dianggap sebagai pekerjaan cinta kasih.

Itu sebagian keruh-rendahan dan kesalingsurupan pemahaman kita terhadap pekerjaan sosial dan kerelawanan. Di sisi lain, kerelawanan, karena sifatnya yang memang tidak mendapatkan imbalan kerja yang cukup atau memadai, lebih banyak diarahkan kepada perempuan. Bahkan, misalnya dalam suatu perusahaan, pengurus *corporate sosial responsibility* (CSR) kebanyakan diserahkan kepada perempuan. Serta merta orang mengaitkan kerelawanan dengan gendernya perempuan dan bukan laki-laki. Contoh lain, persoalan KDRT, perempuan konsen untuk sampai ke Women Crisis Center (WCC) untuk berbicara kepada aktivis atau pekerja di WCC sehingga persoalannya dapat direspon dengan cepat sebagaimana kebutuhan si korban dan diberikan layanan-layanan yang dia butuhkan. Hal-hal semacam itu tentunya tidak bisa disampaikan ke laki-laki. Apalagi jika sampai kepada kekerasan seksual, seperti perkosaan misalnya. Itu argumennya jelas. Tetapi kenapa kerja sosial gendernya harus perempuan? Apakah karena sikap dan wataknya yang feminin; artinya dia welas asih, tekun, telaten, pelindung, perawat? Secara produktivitas perempuan sangat produktif dan pada saat yang bersamaan juga sangat rela dan bersedia jika keproduktifannya tidak dihargai secara materi.

Dari pengamatan Mbak, bagaimana peran perempuan dalam kerja sosial dan kegiatan kerelawanan di Indonesia selama ini?

Peran perempuan sebagaimana yang terjadi dalam konteks sosialnya, menurut saya didasarkan dari hal-hal yang bersifat karitatif, perawatan, perlindungan, perajutan kasih sayang. Walaupun orang masih cenderung menyerahkan begitu saja pekerjaan sosial kepada gender perempuan. Padahal menurut saya gender bukan mewakili kata perempuan.

Gender itu suatu peran karakter watak sosial yang diberikan kepada anggota warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Saya juga masih mengatakan “ya” atas asumsi bahwa perempuan secara ekonomi lebih banyak tergantung atau mengharapkan kebutuhan ekonominya terpenuhi oleh laki-laki. Sehingga perempuan memiliki ruang lebih untuk mengisi hal-hal yang tidak terlalu ekonomi dasar. Padahal kita tahu bahwa asumsi ini keliru. Banyak perempuan kepala keluarga bekerja, misalnya, kampung-kampung di Mataram, Jawa yang namanya kampung janda; yang semua laki-lakinya pergi migrasi. Jadi kalau mengharapkan bahwa kerelawanan itu hanya diisikan atau diberikan kepada perempuan, sebetulnya itu harapan yang agak terburu-buru. Artinya lebih banyak nilai asumsinya daripada faktanya. Karena itu tetap bisa dibutuhkan dari dua pihak.

Jadi, hal-hal yang masih membutuhkan *ethics of care*, faktanya memang lebih banyak diminati dan diramalkan oleh perempuan. Hal ini juga tidak terlepas dari kultur kita yang mendidik dan membentuk gender perempuan sejak kecil, mudai dari lingkungan rumah / keluarga, sekolah, dan masyarakat, agar memahami kerja-kerja dan prinsip-prinsip perawatan.

Menurut Mbak Myra, apakah konteks tersebut khas Indonesia?

Saya kira tidak harus terbatas geografis karena di setiap budaya dominan, yang dominan itu mengajarkan bahwa berbagai urusan, aksi, maupun prinsip nilai-nilai perawatan diserahkan kepada perempuan; digenderkan kepada perempuan. Namun, pada bangsa-bangsa yang budaya masyarakatnya tidak terlalu patriarkis, sudah mulai membagi pekerjaan perawatan itu dengan laki-laki. Di negara-negara seperti itulah kita temui pekerja sosial laki-laki. Di negara-negara Skandinavia, misalnya, para pekerja untuk perawatan di WCC diramalkan pula oleh laki-laki. Di Kanada konon justru lebih banyak mengolah gendernya laki-laki untuk juga menjadi simpul penting dari perawatan.

Apakah ada perbedaan yang signifikan dari peran dan pengaruh yang diciptakan oleh relawan perempuan dibandingkan relawan laki-laki?

Menurut saya itu harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. Misalnya, sebagai awalan kita bisa ke STPS (Sekolah Tinggi Pekerja Sosial) Widuri di Kebayoran Lama. Kita bisa mencari tahu seberapa besar perbandingan animo mahasiswa laki-laki dan perempuan. Namun yang lebih penting lagi, setelah lulus apakah ada perbedaan yang signifikan berkenaan dengan pilihan kerjanya. Memang hal ini tidak mewakili seluruhnya tetapi cukup untuk mengindikasikan sejauh mana peranan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita bisa juga menarritahu ke sekolah perawat. Kerena di dalam perawatan bukan hanya profesionalisme yang dituntut, namun yang kepedulian, welas asih, dan kesediaan merawat kehidupan itu sendiri. Perawat itu memiliki jam kerja yang nyaris 24 jam. Ini benar-benar pekerjaan *caring* yang mungkin tidak ternilai secara profesional. Kita bisa mencari tahu apakah kerja-kerja keperawatan itu lebih diisi laki-laki atau perempuan? Lebih lanjut bisa ditanyakan pula apakah perawat perempuan misalnya jauh lebih disukai ketimbang laki-laki.

Selain itu, kita juga bisa menanyakan ke YLKI, sekolah pendidikan tinggi dan akademi. Seberapa besar, misalnya, animo orang terhadap layanan kesehatan keperawatan, pendidikan. Apakah guru laki-laki lebih disukai ketimbang guru perempuan? Walaupun fakta menunjukkan fungsi dan peranan guru lebih banyak diisi oleh perempuan, khususnya pendidikan dasar. Apakah peran-peran dosen itu lebih baik diperankan oleh perempuan

atau laki-laki? Itu juga sebetulnya perlu penelitian lanjut yang saya sendiri pada saat ini tidak mempunyai data yang memadai.

Namun, dalam pendidikan dasar, animo masyarakat dalam rangka mencari sekolah TK atau *playgroup* atau sekolah dasar sebagian besar masih melihat apakah gurunya perempuan atau laki-laki. Hal ini disebabkan masyarakat masih meletakkan gender. Mereka masih mengharapkan bahwa peran perempuan (ibu) adalah mendidik selain mengasuh. Di dunia pendidikan pun perlu kualitas kerelawanan untuk lebih mau mengikuti jalan pikiran dan posisi orang. Jadi menurut saya, kerelawanan itu kalau boleh didefinisikan sementara, melakukan sesuatu lebih dari harapan sesuatu itu dilakukan; rela lebih lama, rela lebih murah, rela lebih tidak dihargai, rela lebih sulit.

Salah satu contoh lagi yang menarik adalah ketika Komnas Perempuan membuka iklan / undangan kepada masyarakat luas lewat internet juga media cetak. Hasilnya, boleh dikatakan 90% lebih peminatnya adalah perempuan. Saya belum melihat laki-laki yang sudah mempunyai pekerjaan mapan mau bergabung dalam kerja sosial. Laki-laki yang masuk adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau karena sesuatu dan lain hal mempunyai pengalaman yang kental terkait dengan kekerasan.

Sejauh mana pengaruh para relawan dalam mewarnai kegiatan kerelawanan agar lebih berperspektif gender atau sensitif gender?

Menurut saya itu harus dikembalikan kepada kesadaran (*gender awareness*) maupun kepekaan gender (*gender sensitivity*) masyarakat kita, juga intelektual dan hasil sekolah pada umumnya sampai dimana. Karena *satu*, individunya sendiri tanpa ada kesadaran gender segala pekerjaan yang dilakukan akan dipenuhi dengan hal-hal yang bias gender. *Kedua*, menurut saya penting adalah institusinya sendiri dimana dia bekerja. Institusi, apapun itu, harus memiliki mekanisme kerja yang dapat menumbuhkan kesadaran gender. Jadi, menurut saya pekerjaan itu bukan karena kelaminnya, laki-perempuannya, tetapi lebih karena perspektifnya.

Enarson dalam *Women's Voluntary Work Expands: Gender Equality, Work, and Disaster Reduction: Making The Connections*, memaparkan bagaimana perempuan yang bekerja sebagai *volunteer* di berbagai kegiatan sosial seringkali secara sosial tidak diperhitungkan. Kenapa ini bisa terjadi?

Saya ingin menegaskan kembali dari beberapa alasan yang sudah saya kemukakan sebelumnya bahwa kerja-kerja perawatan atau kerelawanan perempuan sering dilihat sebagai aktivitas sehari-hari atau dilihat *taken for granted*. Saking sehari-harinya bahkan membuat kerja-kerja sosial perempuan kurang dilihat, itu *satu*. *Kedua*, misalnya dalam kasus bencana tsunami. Kerja perajutan, saya analogikan demikian, karena peran perempuan dalam bencana adalah menggabungkan hal-hal kecil menjadi sesuatu yang besar. Misalnya, mengingatkan para *developer*, ketika membangun kamp pengungsian agar membangun WC umum yang sama banyak bagi kaum perempuan, juga tempat untuk ngurusin bayi. Hal-hal semacam ini tidak kelihatan secara fisik, tidak kelihatan prestisnya dibandingkan pekerjaan *developer*-nya yang berhasil membangun.

Belajar dari gempa Jogja, misalnya, pada awalnya relawan didominasi laki-laki. Tetapi dari jumlah laki-laki yang banyak dan perempuan yang sedikit tetap ada kasus pelecehan seksual terhadap perempuan; tetap ada kasus penguasaan laki-laki atas perempuan. Perempuan sangat "rentan" dengan sistem yang ada selama ini. Mengapa jika didominasi

perempuan misalnya, tidak terjadi sebaliknya? Secara struktur ketata-pengelolaan masih patriarki; lebih banyak diserahkan ke laki-laki.

Contoh kasus lain adalah pengamatan pribadi saya selama beberapa kali bekerja di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Saya tidak tahu bagaimana kebijakan yang berlaku umum ini faktual. Beberapa daerah di NTT, misalnya Flores, Kupang, Timor adalah basis umat Katolik. Para suster bekerja keluar masuk desa, ke pelosok, dan menyelesaikan mulai dari hal-hal yang kecil sampai kerja-kerja keperawatan. Tapi siapa yang mendapat penghargaan lebih? Pastor. Begitu dibangun satu institusi rumah ibadah atau gereja, fasilitas untuk pastor (pemimpin laki-laki), 10-50 kali lipat dariarganya.

Contoh lain yang faktual adalah apa yang terjadi di pesantren. Nyai merawat dan memberikan pendidikan kepada para santri-santriwati di pesantren. Siapa yang selalu dikenal masyarakat luas atas keberhasilan pesantren? Ini bukan soal kea-gamaan namun persoalan ini bisa menjadi satu kajian menarik apakah memang secara eksplisit, hal itu merupakan kebijakan (*policy*) institusi, atau lebih menekankan pada *value*, praktek kebudayaan, atautkah pola pikir.

Menurut saya perlu redefinisi dan tinjauan kritis terhadap definisi pemimpin. Secara formal kebudayaan, yang disebut dengan kepala keluarga (KK) itu pasti laki-laki. Meskipun faktanya menunjukkan pengelola dan pengurus utama sekaligus pemimpin suatu unit rumah tangga atau keluarga itu adalah perempuan. Dan menurut saya itu hanya persoalan formal administrasi ketika alasannya karena laki-laki yang bekerja. Jadi persoalan administrasi juga cukup berpengaruh dalam budaya patriarkis; yang diutamakan menjadi seorang pemimpin adalah laki-laki.

Jadi, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi yang ada hubungannya dengan agama, juga turut menjelaskan buku Emerson. Walaupun mungkin itu bukan jadi kajian dia. Tapi jika melihat faktanya di Indonesia, menurut saya pengaruh budaya, dalam hal ini agama, kental sekali. Bukan hanya Islam atau Katolik namun agama-agama yang masih banyak memaknai kepemimpinan atau keunggulan itu pada laki-laki.

Dalam kasus penanganan bencana, misalnya, dalam setiap tahapan bencana, kerja perempuan sering tidak diperhitungkan. Padahal, relawan perempuan dituntut berperan banyak karena perempuan dan anak perempuan adalah merupakan bagian daftar kelompok dengan risiko tinggi terhadap bencana dan memiliki kebutuhan khusus yang sering terabaikan. Kenapa terjadi semacam itu?

Penjelas utama dari pertanyaan tersebut adalah bahwa yang sangat dominan adalah perspektif mengenali kebutuhan, baik secara metode maupun bahasa administrasi. Secara metode, misalnya, ketika bencana terjadi siapa yang didatangi dan ditanyai pertama kali, apakah perempuannya? Tidak tetapi ketua kelompok yang diasumsikan laki-laki. Contoh di Aceh, fakta membuktikan bahwa sampai 2004 / 2005 seluruh kebijakan tentang mitigasi dan peresponan terhadap bencana tidak pernah memikirkan kebutuhan pokok perempuan (pakaian dalam, pembalut) atau tempat untuk ibu-ibu melahirkan, menyusui. Kemudian ketika ahli-ahli mitigasi internasional didatangkan, baru kesadaran tentang kebutuhan perempuan ada perubahan. Itu lagi-lagi pengaruh internasional yang sudah lebih dahulu menjalankan.

Dan itu tidak hanya terjadi dalam kasus bencana, tetapi juga dalam proyek-proyek pembangunan. Seluruh proyek pembangunan di desa atau di masyarakat yang agrikultur; baik tentang air, ternak, dan akses mobilitas untuk perdagangan, hubungan relasi sosial, ekonomi dan lain-lain. Setiap ada proyek pembangunan di desa, secara administratif selalu

yang ditanya dan didatengi adalah KK. Padahal, pengguna atau pelaksana proyek pembangunan mulai air bersih, pengampuhan kambing, sapi, atau ternak lain adalah perempuan. Itu yang menyebabkan banyak proyek pembangunan bahkan penanganan bencana yang luput karena tidak tepat sasaran dalam memahami kebutuhan.

Berdasarkan pengamatan saya, dari advokasi yang kami lakukan di tengah 80-an sampai awal 90-an. Misalnya dalam penentuan UMR (Upah Minimum Regional). Basis penentuan UMR pada waktu itu didasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM). Di samping uang makan 3 kali sehari, ada uang sarung, kopiah, dan rokok. Permasalahannya yang dijadikan standar KFM adalah standar kebutuhan laki-laki. Hal itu terjadi karena orang-orang di organisasi perburuhan kebanyakan laki-laki. Apakah kebutuhan perempuan pernah ditanyakan atau diteliti? Faktanya, pembalut adalah salah satu kebutuhan pokok yang mutlak untuk pekerja perempuan usia produktif (karena kebanyakan buruh adalah usia produktif mulai usia tengah belasan sampai tengah dua puluhan). Bahkan yang lebih ekstrem, perempuan haid dianggap tidak produktif sehingga ada pengurangan gaji. Padahal faktanya, perempuan haid yang kesakitan pun dipaksa untuk masuk kerja karena cuti haid ketika itu tidak menjadi keotomatisan seorang pekerja perempuan. Jadi, pengabaian kebutuhan perempuan tidak hanya terjadi dalam kasus bencana, namun juga dalam kasus sosial atau kerja-kerja kerelawanan.

Pengabaian terjadi karena perempuan tidak pernah ditanya dan ketika pembuatan kebijakan berlangsung tidak ada suara perempuan di situ. Dan walaupun ada biasanya jumlahnya terlalu kecil sehingga terlalu lemah untuk mewakili kepentingan perempuan. Perlu ada lebih dari sekedar keyakinan atau kesadaran atau kepekaan gender bahwa ternyata kebutuhan perempuan itu berbeda dari laki-laki. Bukan sekedar lebih kurang, lebih sedikit, atau lebih banyak. Bahwa itu berbeda secara filosofis, bahasa Indonesia bisa menjelaskan lebih baik, dibandingkan istilah Simon de Bufoir '*second sex* atau orang kedua', yaitu 'liyan'. Liyan berarti bahwa kamu orang lain jadi yang selalu dijadikan standar itu saya. Saya ini laki-laki maka perempuan akan selalu menjadi liyan. Sampai dalam tahap ini sebenarnya tidak ada masalah, namun konsekuensi logisnya adalah kebutuhan perempuan pun menjadi *secondary*. Sehingga dalam kerelawanan pun kebutuhan perempuan terabaikan. Setinggi apapun peran perempuan tetap akan diabaikan karena itu konsekuensi logis penomorduaan atau peliyanan warga negara perempuan.

Menurut Mbak Myra, mengapa perempuan sering ditempatkan untuk mengurus bagian logistik, dan mengurus masalah teknis administratif?

Kalau masalah logistik kembali ke *ethic of caring*; *caring* sebagai suatu watak dan peranan sekaligus, bukan hanya soal feminitas watak karakter tapi juga suatu peran. Peran *caring* bisa ditimpakan atau dibebankan kepada perempuan. Tidak heran jika peran sekretaris, PR, bendahara/kasir bisa dipegang perempuan. Ini menarik kalau kita memikirkan secara refleksif dan cukup adil atau jujur. Polwan, misalnya, dengan pendidikan yang sulit, tahunan, dan mahal. Saya bilang sulit karena kepercayaan polisi yang agak konservatif ketika mendidik polwan. Artinya mereka harus mendirikan asrama khusus untuk perempuan, juga beberapa fasilitas lain yang berbeda dengan polisi laki-laki. Sehingga, jika POLRI masih mengatakan, "Kuota perempuan dalam pendidikan polisi masih rendah sekali." Sekarang anggota polwan hanya kurang dari 3%. Walaupun ada peningkatan tidak lebih dari 5% dari kebutuhan yang seharusnya sudah mendekati 40-50%. Namun hal ini terhambat dengan institusi pendidikannya sendiri yang belum merespon.

Secara filosofis, polisi sebagaimana yang dikonstruksikan di Indonesia, cocok dengan gender perempuan. Karena polisi berbeda dengan tentara, yang seharusnya lebih menjalankan fungsi *caring* sekaligus juga fungsi sosial. Faktanya polwan tidak jarang memerankan fungsi ganda, misalnya membawa nampan pada saat upacara / peresmian, mengantarkan minum atasan. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan orang, *human resources development*, di Indonesia ini masih jauh sekali ketinggalan. Kita masih terlalu konservatif, berpegang pada pegangan-pegangan gender yang usang. Perlakuan terhadap polwan tadi menunjukkan adanya pandangan yang tidak sensitif gender. Pandangan ini menempatkan perempuan di fungsi-fungsi utama sebetulnya karena perawatan. Tetapi tidak diutamakan karena nilai kerjanya dianggap sekunder. Bendahara, misalnya, posisi yang penting. Namun, ketika level organisasinya besar, posisi bendahara biasanya dipegang oleh laki-laki dan kasirnya perempuan. Pekerjaan-pekerjaan yang langsung berhubungan dengan publik pun, seperti *purel*, *teller bank* atau *account executive* sebagian besar dipenuhi oleh perempuan. Hal-hal yang berhubungan dengan publik mengandalkan keluwesan atau watak feminin perempuan, tapi kendali tetap di tangan laki-laki.

Itu juga menjelaskan, secara kultur, misalnya kita sering menyebut di Minang itu matriarkat. Itu salah besar. Sebenarnya yang terjadi di suku Minangkabau atau orang Padang itu matrilineal tapi tetap patriarkat. Matrilineal karena garis keturunan saja didasarkan pada perempuan dengan praktik-praktik dan contoh-contoh aturan agama Arab yang lebih patriarkis.

Apakah ini terkait Imaji yang dihadirkan media dan persepsi masyarakat yang memandang relawan perempuan sebagai pekerja sosial yang penakut, berperasaan halus dan aktor yang pasif?

Ya, itu imaji media saja; citra yang dibentuk media dan bukan kenyataan yang sesungguhnya. Itu hanya bias gender. Misalnya, iklan koran pada masa rekonstruksi Aceh, "Dibutuhkan laki-laki begini, begini, dst." Itu salah satu contoh pencitraan. Faktualnya perempuan pun boleh tetapi yang disebutkan hanya laki-laki, *satu*. *Kedua*, secara kultur dan kaitan sosial jarang sekali orang tua yang merelakan anak perempuan mereka untuk bekerja di daerah bencana. Tapi media mengungkapkan keterbatasan jumlah perempuan di daerah bencana tersebut dengan kurang proporsional. Bahkan dalam kasus lain, misalnya, banyak dokter PTT yang diperkosa ketika masuk ke kepulauan Maluku dan daerah rawan lainnya. Jadi menurut saya, imaji semacam itu hanya prasangka, betul-betul purbasangka gender yang sudah saatnya harus ditinggalkan.

Kita tidak jarang sudah melakukan sosialisasi ke media. Pernah awal 2000-an hingga 2004 kami bekerjasama dengan lembaga Ashadi Siregar di Yogyakarta. Kita mengadakan training bagi wartawan, *script writer*, juru iklan, dan production house media-media besar dan kecil. Persoalan besarnya, setiap undangan yang kami sampaikan kepada dewan redaksi sebagai penentu kebijakan hanya mendelegasikan wartawan junior dan tidak jarang perempuan. Begitu pun ketika Komnas Perempuan melaunching catatan tahunan setiap 8 Maret atau bertepatan dengan hari perempuan internasional. Berita yang ditulis si wartawan pun akan sia-sia jika penentu kebijakan atas layak tidaknya tulisan tetap tidak memahami perspektif gender secara komprehensif. Menurut saya, itu menunjukkan, *satu*, kurangnya kesadaran akan *human resource development*. *Kedua*, secara citra itu adalah pelecehan terhadap substansi itu sendiri.

Di pasar internasional atau kapitalisme, perempuan hanya dianggap alat, bukan aktor. Misalnya, pembuatan iklan yang lebih meletakkan perempuan sebagai objek. Selama ini kita

lebih sering menyalahkan perempuannya. Seperti RUU APP juga demikian dan bukan sistemnya. Padahal menurut saya, ini hanya soal sistem dan mekanisme pasar, apa yang dihargai di pasar, Perempuan tidak bisa disalahkan karena yang membuat sistem itu sendiri mayoritas laki-laki. Misalnya, fenomena sekarang orang tua pasti senang jika anak-anak mereka terkenal. Entah dengan mengikuti 'Indonesian Idol', 'Dai Cilik', AFI, KDI, dan berbagai ragam acara serupa. Kalau TV tidak melihat ini sebagai jualan atau komoditas yang baik, tidak akan ada lomba-lomba semacam itu. Bagaimana jika dihubungkan dengan peran media sebagai pendidik masyarakat?

Harus diakui bahwa bentuk partisipasi dan kerelawanan perempuan menjadi lebih berat ketika harus dihadapkan dengan norma pembagian kerja berbasis gender. Lantas, Bagaimana bentuk kerelawanan yang ideal bagi relawan perempuan?

Saya kira itu tidak perlu diperdebatkan ya. Semua kembali pada penjelasan saya di awal bahwa secara disiplin keilmuan, kebidangan, disiplin, atau sektor apapun harus dibuka luas baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan diberlakukan setara, tidak ada perbedaan bahwa ini sensitif perempuan baik dalam evaluasi maupun pemantauan. Tentunya kegiatan kerelawanan harus lebih sensitif gender dan tidak hanya menggunakan patokan-patokan usang konservatif dimana laki menjadi tolak ukur sehingga perempuan jadi liyan. Menurut saya tidak perlu kondisi ideal semacam itu.

Bagaimana upaya agar relawan perempuan tidak sekedar menyumbang tenaga, tetapi juga ikut memberi warna dan menjadi penentu kebijakan terhadap kegiatan kerelawanan yang dilakukannya?

Saya kira sekarang banyak perempuan menjadi penentu kebijakan yang sudah menjadi ekspertisnya. Hanya saja jika dinilai sempit berdasarkan imbalan / renumerasi, itu semua masih tergantung pada kebijakan ekonomi, penentuan kerja, nilai kerja, pasar, dsb. Sebagian besar perempuan masih menempati ruang kerja-kerja perawatan dan kelangsungan hidup yang identik dengan cinta kasih. Dan menurut saya kerja-kerja perempuan akan lebih baik jika diapresiasi. Pada titik ini sudah saatnya media pun tidak selalu didominasi kekuatan pasar atau modal tetapi juga dimasuki dengan cukup imbang atau memadai oleh kepentingan-kepentingan pendidikan. Kalau media sudah bisa bekerja seperti itu, saya rasa pencitraan perempuan dan aktivitas kerelawanannya akan lebih dipahami masyarakat dengan lebih baik.

Satu hal yang cukup signifikan adalah perubahan sistem. Relawan perempuan tidak akan mendapatkan penghargaan lebih jika sistem yang berlaku di pasar masih didominasi oleh laki-laki. Bahkan kultur yang sangat kuat melekat turut memperdayakan posisi perempuan.

Apakah perlu dilakukan perubahan terhadap model rekrutmen, pendidikan dan mekanisme kerelawanan di berbagai organisasi sosial sehingga lebih mengakomodir potensi dan kepentingan relawan perempuan?

Saya kira pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mencaritahu apakah pola rekrutmen sekarang ini sudah kelihatan cacat atau bermasalah. Selama belum kelihatan bermasalah saya kira tidak perlu ada perubahan dalam perekrutannya. Seperti yang saya contohkan sebelumnya dengan Komnas Perempuan. Ternyata pendaftar untuk suatu judul

aktifitas yang ada kata 'kerelawanan' dengan jelas ditepiskan oleh tenaga produktif laki-laki. Kita bisa coba tanyakan ke YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mengenai pelamar / *volunteer* mereka. Dengan definisi yang kurang lebih sama, bagaimana komposisi pelamar laki-laki dan perempuan? Walaupun kalau LSM sekarang tidak ada dominasi jenis kelamin. Tetapi stereotip sebagian tetap ada, misalnya pada penyerahan wewenang dalam organisasi. LSM kadang-kadang masih terimbas pada peletakan manusia sebagai sumber daya terhadap bidang-bidang tertentu yang dianggap mewakili gender atau watak, entah feminin atau maskulin.